

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk dari kemajuan zaman adalah teknologi. Saat ini, teknologi semakin banyak dipergunakan oleh masyarakat di segala kalangan. Internet, atau teknologi berbasis web, merupakan salah satu teknologi yang paling maju. Ketersediaan teknologi internet di dunia saat ini memungkinkan Publik untuk mendapatkan data secara cepat, akurat, dan tepat. Dengan teknologi internet membantu setiap pekerjaan yang pada mulanya Dilakukan secara manual serta memakan waktu lama, namun dengan kemajuan teknologi internet serta sistem komputer modern, proses pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Adapun sistem *on-line* sering juga disebut sistem daring (dalam jaringan) kini semakin terkenal juga meluas di masyarakat Indonesia.

Di pemerintahan sendiri, pemanfaatan teknologi internet disebut *e-government*. *E-government* di negara Indonesia bermula dengan munculnya Inpres No 3/2003 mengenai Kebijakan serta Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, adanya intruksi ini dibuat dengan pertimbangan kebermanfaatan ICT (*Informartion and Communication Technologies*) yaitu meningkatkan kualitas serta efisiensi dalam proses penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat (Yuniadi M, 2016: 15). Sebagai respon dari peningkatan kualitas juga efisiensi dalam proses penyelenggaraan pelayanan sendiri Kota Semarang menciptakan program *e-parking* sebagai upaya menuju *e-government* ditingkat lokal dimana

diterapkan pada sektor perparkiran guna memberi kemudahan untuk masyarakat. *E-parking* merupakan perangkat yang gunanya menerima pembayaran parkir secara elektronik juga menggiring sebuah kota menuju kota pintar dengan langkah pemanfaatan teknologi (Firmansyah, B., dkk. 2023: 9). *E-parking* saat ini sudah diberlakukan di beberapa kota di negara Indonesia seperti kota Medan, Yogyakarta, Tabunan Bali, dan Kota Semarang. Salah satunya di Kota Semarang *e-parking* diharapkan dapat mengarah kepada kemajuan dibidang pemanfaatan teknologi yang menggiring ke perwujudan *smart city* atau kota pintar. Program *e-parking* di Kota Semarang diluncurkan pada Februari tahun 2022 oleh Pemkot Semarang melalui Dinas Perhubungan dengan dasar Peraturan Wali Kota Semarang No 70 /2021 mengenai Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. *E-parking* menjadi sebuah komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam menjaga ketertiban perparkiran di seluruh area Semarang juga parkir di area tepi jalan Kota Semarang.

Jawa Tengah ialah provinsi yang menjadi salah satu pendukung perekonomian, pendidikan, dan kebudayaan, sehingga membuat jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah mencapai 38,13 juta jiwa (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada bidang retribusi parkir kendaraan di Kota Semarang. Salah satu sumber PAD didapatkan dari retribusi daerah, seperti yang tertuang pada UU No 32 /2004 mengenai Perda Pasal 157., maka adanya peningkatan jumlah penduduk serta kepemilikan kendaraan dinilai sebagai hal yang penting serta harus di perhatikan pemerintah daerah. Retribusi parkir sendiri ialah suatu pembayaran yang dikenakan bagi pengguna area yang diatur oleh Pemerintah Daerah serta memungkinkan dalam pelaksanaanya juga ada

kerjasama dengan sektor swasta (Dewi, Sheila Ratna. 2013: 6). Berikut target serta realisasi PAD Kota Semarang dari retribusi parkir tepi jalan di Kota Semarang:

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD dari
Retribusi Parkir di Kota Semarang Tahun 2021-2023**

Tahun	Target	Realisasi Pendapatan
2021	Rp. 1.680.566.500	Rp. 1.974.238.000
2022	Rp. 4.640.605.000	Rp. 2.826.629.301
2023	Rp. 5.015.101.824	Rp. 3.772.050.700

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024

Dari tabel 1.1 pada tahun 2021 memiliki realisasi pendapatan yang lebih dari target PAD yang ditentukan, tetapi untuk tahun 2022 dan 2023 realisasi PAD memiliki penurunan dari target yang ditentukan. Adanya realisasi pendapatan yang tidak sesuai target saat keberjalanan parkir elektronik seringkali disangkutkan dengan ketidakmudahan peralihan sistem parkir yang awalnya manual bergeser ke sistem *online*.

Kota Semarang menjadi salah satu dari 5 kota besar di Indonesia. Masyarakat Kota Semarang berdasar data BPS sejumlah 1.659.975 pada tahun 2022 dan meningkat hingga 1.694.743 pada tahun 2023 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023). Hal ini membuat tingkat kepemilikan barang pribadi salah satunya kendaraan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk.

Berikut data peningkatan jumlah kendaraan pribadi di Kota Semarang:

**Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Pribadi
di Kota Semarang Tahun 2019-2022**

Tahun	Sepeda Motor	Mobil
2019	112.771.136	20.845.876
2020	115.023.039	21.114.412
2021	120.042.298	21.950.275
2022	125.305.332	22.956.485

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2024

Dari tabel 1.2 jumlah kendaraan pribadi di Kota Semarang meningkat selama 4 tahun terakhir. Jumlah kendaraan pribadi untuk sepeda motor meningkat dari 120.042.298 tahun 2021 menjadi 125.305.332 tahun 2022, dan untuk mobil meningkat dari 21.950.275 menjadi 22.956.485. Jumlah kendaraan pribadi di Kota Semarang yang meningkat berkaitan dengan efektivitas program *e-parking* dalam mewujudkan *smart city* di Kota Semarang, adanya peningkatan jumlah kendaraan pribadi membuat semakin bertambahnya pergerakan (mobilisasi) kendaraan di jalan dan pengelolaan parkir tepi jalan akan tetapi di Kota Semarang parkir tepi jalan belum dikelola dengan baik.

Berikut tabel jumlah dan lokasi titik parkir elektronik di Kota Semarang:

Tabel 1.3 Jumlah Jukir dan Lokasi Titik

E-Parking di Kota Semarang

No	Lokasi Titik <i>E-Parking</i>	Jumlah Titik	Jumlah Jukir
1	Jl. Agus Salim - Jl. Arif Rahman Hakim	36 Titik	28 Jukir
2	Jl. MT Haryono - Jl. Sriwijaya	81 Titik	67 Jukir
3	Jl. Pekojan – Jl. Plampitan	48 Titik	43 Jukir
4	Jl. Wahid Hasyim – Jl. Gajahmada	75 Titik	69 Jukir
5	Jl. Ahmad Dahlan – Jl. Pringgading	50 Titik	47 Jukir
6	Jl. Erlangga Raya – Jl. Atmodiriono	51 Titik	42 Jukir
7	Jl. Dargo – Jl. Kartni	35 Titik	32 Jukir
8	Jl. Tlogosari – Jl. Parangkesit Raya	12 Titik	9 Jukir
9	Jl. Gajah Raya – Jl. Majapahit	7 Titik	2 Jukir
10	Jl. Anjasmoro – Jl. Sugiyopranoto	14 Titik	2 Jukir
11	Jl. Sutama – Jl. Karyadi	19 Titik	9 Jukir
12	Jl. Setia Budi – Jl. Banjarsari	35 Titik	21 Jukir
	Total	436 Titik	376 Jukir

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024

Dalam hal *Egoverment* yang dijalankan di Kota Semarang maka Pemkot Kota Semarang mencetuskan *e-parking* yang mana digunakan untuk memudahkan pelayanan bidang pembayaran parkir dengan teknologi berupa sistem secara daring (dalam jaringan). *E-parking* di Kota Semarang dijalankan di 436 titik di Kota Semarang dan di percayakan ke 376 juru parkir pilihan yang diberikan pelatihan serta sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Masalah penelitian ini yang pertama ialah berkaitan dengan PAD yang tidak sesuai antara target dan realisasi di tahun 2022 dan 2023 di saat parkir elektronik tersebut sudah berjalan dirasa adanya pergeseran sistem retribusi dari manual ke *online* membuat target dan realisasi PAD tidak sesuai. Masalah kedua ialah berkaitan dengan *e-parking* di Kota Semarang yang sudah ditetapkan 436 titik *e-*

parking yang harusnya diawasi oleh juru parkir di tiap titiknya tetapi di lapangan hanya terdapat 376 juru parkir yang diberikan pelatihan teknis mengenai *e-parking* oleh Dishub sehingga pengelolaan parkir di Kota Semarang belum baik dilihat dari kesulitan juru parkir untuk mengawasi 2 hingga 3 titik sekaligus yang lokasinya berjarak 1km sehingga juga itu membuat adanya parkir liar akibat adanya kesempatan saat titik *e-parking* lengah dari pengawasan juru parkir khusus dan itu menjadikan adanya kebocoran PAD di Kota Semarang. Dari hal yang melatarbelakangi ini penulis tertarik mengambil judul “Efektivitas Program *E-Parking* Dalam Mewujudkan *Smart City* Di Kota Semarang” juga diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu melihat efektivitas program *e-parking* dan dapat mengetahui faktor pendorong serta penghambat efektivitas program *e-parking* di Kota Semarang.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Supaya studi ini bisa dijalankan lebih terperinci, maka penulis mengidentifikasi permasalahan studi ini yakni :

- a) Ketidaksesuaian antara target dan realisasi PAD retribusi parkir
- b) Ketidaksesuaian jumlah target dan realisasi parkir titik *e-parking*

1.3 Perumusan Masalah

1. Apakah Program *E-Parking* dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Semarang sudah efektif?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat efektivitas Program *E-Parking* dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas Program *E-Parking* dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis berbagai faktor pendorong dan penghambat efektivitas Program *E-Parking* dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Pada peneitian ini, diharapkan mampu berfungsi untuk pengembangan teori serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Serta menjadi refrensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Studi ini memberi pengalaman serta meluaskan wawasan pemahaman peneliti, juga meningkatkan kemampuan peneliti untuk mengerjakan suatu penelitian sesuai dengan metode penelitian yang benar serta sesuai dengan pesyaratan penelitian ilmiah yang baik.

b. Bagi Kota Semarang

Selepas adanya riset diharapkan dapat memberikan bahan masukan serta pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelayanan publik.

c. Bagi Civitas Akademik

Riset ini diharapkan dapat menambah kumpulan kepustakaan serta sumber wacana guna orang yang belajar di perguruan tinggi khususnya mahasiswa Undip.

1.6 Kerangka Pemikiran Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis dan Judul Artikel dan Nama Jurnal	Metodologi	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Yana, Sri Dewi. (2021). Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Membangun Sumberdaya Manusia Di Tengah Pandemi. Jurnal Investasi Islam. Vol. 6. No. 1. Juni 2021: 12-21.	Metode deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara.	Studi ini berlokus di Negara. Indonesia.	Studi ini mengkaji tentang efektivitas program kartu prakerja dan peran program prakerja dalam membangun sumberdaya manusia.	Hasil studi yang didapat menemui hambatan seperti pada masyarakat yang kurang melek teknologi.	Hasil penelitian yang didapat yaitu memiliki keunggulan dimana adanya program kartu prakerja mampu menambah kemampuan dan pengetahuan masyarakat dengan adanya pelatihan.

Nama Penulis dan Judul Artikel dan Nama Jurnal	Metodologi	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Norsanti. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Batumandi Di Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan desa Banua Hanyar). Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol. 3. No. 1. Hal. 10-21. E-ISSN: 2775-0590. P-ISSN: 2665-3856.	Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian ini ber lokus di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan.	Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas program percepatan penurunan <i>stunting</i> .	Hasil studi yang didapat menemui hambatan seperti pada Minimnya pendanaan, pengetahuan orang tua, serta kondisi ekonomi keluarga balita <i>stunting</i> , kurang sosialisasi tentang pola asuh anak.	Hasil penelitian yang didapat yaitu memiliki keunggulan dimana adanya kerjasama yang baik antara petugas gizi dari UPT Puskesmas Batumandi, bidan desa, kader Posyandu, dan kader PMT.
Lubis, Ema Fitri., & Zubaidah, Evi. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial. Vol. 9. No. 2. Hal. 88-99. P-	Metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian ini ber lokus di Pekanbaru.	Studi ini mengkaji tentang efektivitas program keluarga harapan dalam mengatasi kemiskinan.	Hasil penelitian yang didapat menemui hambatan seperti pada jumlah uang yang diterima anggota manfaat belum memenuhi keperluan dari	Hasil penelitian yang didapat yaitu memiliki keunggulan dimana adanya sumberdaya yang sesuai dengan tujuan program.

Nama Penulis dan Judul Artikel dan Nama Jurnal	Metodologi	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ISSN: 2252-603X. E-ISSN: 2354-7693.				masyarakat, faktor pengawasan yang kurang.	
Siregar, Aniyah., dkk. (2022). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Payakumbuh. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 8. No. 1. Hal: 52-68.	Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian ini ber lokus di Kota Paya Kumbuh.	Studi ini mengkaji tentang efektivitas program keluarga harapan dalam menanggulangi kemiskinan.	Hasil penelitian yang didapat menemui hambatan seperti pada kurangnya pengawasan dan sosialisasi program.	Hasil penelitian yang didapat yaitu memiliki keunggulan dimana adanya kemudahan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
Wulandari, Felida., dkk. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Caraka Prabhu. Vol. 4. No. 1.	Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian ini ber lokus di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.	Studi ini mengkaji tentang efektivitas program keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan.	Hasil studi yang didapat menemui hambatan seperti pada belum optimalnya pemberian bantuan, lemahnya sanksi yang diberlakukan oleh pendamping terhadap peserta	Hasil penelitian yang didapat yaitu memiliki keunggulan dimana adanya sosialisasi yang terarah dan tepat ke masyarakat penerima.

Nama Penulis dan Judul Artikel dan Nama Jurnal	Metodologi	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				PKH. yang tidak melaksanakan kewajibannya.	
Sitompul, Jonathan M T. (2022). <i>The Effectiveness Of The Implementation Of The BPJS Health Program In Providing Service To Weak Economic Communities (Study At Helvetia District Health Center, Medan)</i> . Jurnal Kebijakan Publik dan Bisnis. Hal: 37-42.	Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian ini ber lokus di Medan.	Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas dari implementasi program BPJS kesehatan pada pemberian layanan untuk masyarakat tidak mampu (Studi pada Puskesmas Helvetia, Medan)	Hasil penelitian yang didapat menemui hambatan seperti pada kurangnya pengetahuan pasien mengenai BPJS.	Hasil penelitian yang didapat yaitu memiliki keunggulan dimana adanya sarana prasarana yang memadai.
Purba, Ivan E., dkk. (2022). <i>Analysis Of Inhibiting Factors For The Effectiveness Of Public Information Policy In The Services Of</i>	Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan literature review.	Penelitian ini ber lokus di Kota Pematang Siantar.	Penelitian ini mengkaji tentang analisis faktor penghambat efektivitas informasi kebijakan publik	Hasil penelitian yang didapat menemui hambatan seperti pada kurangnya sosialisasi program ke masyarakat.	Hasil penelitian yang didapat yaitu memiliki keunggulan dimana adanya iuran BPJS memperhatikan aspek

Nama Penulis dan Judul Artikel dan Nama Jurnal	Metodologi	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>BPJS During The Covid-19 Pandemic At Puskesmas Kartini, Pematang Siantar City.</i> Jurnal Perpustakaan dan Informasi. Vol. 16. No. 2. ISSN: 1979-7737. E-ISSN: 2442- 8175.			dalam pelayanan BPJS.		kondisi ekonomi masyarakat.
Meilani, Risa., dkk. (2024). <i>Analysis Of The Effectiveness Of BPJS Health Implementation In Merbau Puskesmas: Balance Between Access And Service Quality.</i> Jurnal Keuangan dan Perbankan. Hal: 399-407.	Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Penelitian ini ber lokus di Puskesmas Merbau.	Penelitian ini mengkaji tentang proses akses layanan BPJS sesuai prosedur yang ada.	Hasil penelitian yang didapat menemui hambatan seperti pada adanya antrian yang panjang dan kurangnya tenaga medis.	Hasil penelitian yang didapat yaitu memiliki keunggulan dimana adanya lokasi yang strategis yang mudah dijangkau masyarakat.
Rachmadina, Yola., dkk. (2023). <i>Traffic Management Effectivity Of Bulak Kapal Underpass Development, Bekasi</i>	Metode deskriptif kualitatif dengan wawancara.	Penelitian ini ber lokus di Bekasi.	Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas manajemen lalu lintas di simpang	Hasil penelitian yang didapat menemui hambatan seperti pada adanya kondisi	Hasil penelitian yang didapat yaitu memiliki keunggulan dimana adanya keuntungan

Nama Penulis dan Judul Artikel dan Nama Jurnal	Metodologi	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Indonesia. Indonesian Journal of Multidisciplinary Science</i> . P-ISSN: 2808-5957. E-ISSN: 2808-6724.			Bulak Kapal.	jalan yang kurang memadai.	dari sasaran program bagi masyarakat.
Ginting, Rosalina., dkk. (2022). <i>The Effectiveness of the Family Program (PKH) Management for Poverty Reduction In Karang Tempel Village, East Semarang District, Semarang City, Central Java, Indonesia.</i> <i>Advances in Social Sciences Research Journal</i> . Vol. 9. No. 7. Hal : 559- 565.	Metode deskriptif kualitatif dengan wawancara.	Penelitian ini ber lokus di Semarang.	Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas PKH untuk mengurangi kemiskinan.	Hasil penelitian yang didapat menemui hambatan seperti pada adanya salah sasaran program.	Hasil penelitian yang didapat yaitu memiliki keunggulan dimana adanya pendamping PKH yang telah mendampingi n KPM dengan baik.
Najidah, Nurul. (2019). <i>Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di</i>	Metode deskriptif kualitatif dengan wawancara.	Penelitian ini ber lokus di Rowosari.	Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas Program PKH dalam	Hasil penelitian yang didapat menemui hambatan seperti pada	Hasil penelitian yang didapat yaitu memiliki keunggulan dimana

Nama Penulis dan Judul Artikel dan Nama Jurnal	Metodologi	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. <i>Journal Of Public Policy and Management Review</i> 8 (2). Hal. 69- 87.			mengatasi kemiskinan.	adanya koordinasi yang belum berjalan.	adanya tujuan yang jelas menciptakan kebijakan transparansi.
Pradila, Riska A. (2023). Efektivitas Program “Ngapling” Ngaspal Keliling di Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2021. <i>Electronical Journal of Social and Political Sciences</i> . Vol. 10. No. 4.	Metode deskriptif kualitatif dengan wawancara.	Penelitian ini ber lokus di Lumajang.	Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas Program Ngaspal Keliling di Kabupaten Lumajang.	Hasil penelitian yang didapat menemui hambatan seperti pada adanya kerjasama yang belum baik.	Hasil penelitian yang didapat yaitu memiliki keunggulan dimana adanya tujuan pokok yang jelas yang dijalankan.

Sumber: Data di olah tahun 2024

Manfaat penelitian terdahulu untuk penelitian yakni sebagai pedoman maupun referensi yang berasal dari metode penelitian dan hasil studi terdahulu. Studi terdahulu juga bermanfaat sebagai tolok ukur yang saya gunakan baik dalam proses penulisan maupun proses analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari studi terdahulu. Adapun perbedaan studi ini

dengan beberapa studi terdahulu yakni terdapat di lokasi penelitian yakni penelitian saya. Lokus penelitian ini di Kota Semarang. Selain itu, perbedaan lain dalam penelitian yang saya buat yaitu lebih berfokus pada analisis efektivitas program *e-parking* dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Semarang dan analisis faktor pendorong dan penghambat dalam efektivitas program *e-parking* dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Semarang.

1.6.2 Konsep Administrasi Publik

Karena suatu bangsa telah lama melakukan kegiatan administrasi, maka gagasan tentang administrasi publik bukanlah hal yang baru. Administrasi publik, menurut Caiden, adalah setiap kegiatan administrasi yang dilakukan untuk mengawasi faktor yang berkenaan pada masyarakat (Mindarti, 2016: 4). Kata “publik” berasal dari bahasa Sansekerta “praja”, yang berarti “rakyat”. Oleh karenanya, pemerintah disebut sebagai “pamong rakyat”, yang berarti memenuhi kebutuhan rakyat, negara wara, dan masyarakat.

Menurut Woodrow Wilson, administrasi publik adalah proses pelaksanaan berbagai aspek yang mencakup semua urusan publik. Artinya, selain unsur pemerintah, subjek lain, seperti organisasi masyarakat, organisasi nirlaba, dan lembaga bisnis, juga berperan dalam mengelola urusan publik sebab ketiga aspek tersebut memiliki dampak yang nyata terhadap kehidupan masyarakat (Hidayat, 2007: 22)

Menurut C. T. Goodsell, administrasi publik adalah upaya guna mencapai demokrasi serta memenangkan hati masyarakat. Untuk itu, semua pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam penyediaan pelayanan publik dan daya

saing yang terintegrasi dengan nilai-nilai efektivitas, legitimasi, efisiensi, keadilan, transparansi, dan ketergantungan. (Keban, 2008: 8). Penulis menyimpulkan bahwa administrasi publik ialah suatu proses kolaboratif yang sekelompok individu atau lembaga lakukan dengan tujuan guna mengelola kepentingan publik secara optimal dan efisien melalui penerapan kebijakan pemerintah yang telah diatur. berdasarkan definisi administrasi publik.

Sampai saat ini, telah terjadi banyak pergeseran paradigma dalam ilmu administrasi publik. Menurut Khun sebuah sudut pandang, nilai-nilai, pendekatan, ide-ide fundamental, atau cara menangani masalah yang diterima oleh komunitas ilmiah pada saat tertentu semuanya dianggap sebagai paradigma (Keban: 2008: 31)

Henry menyebutkan Lima paradigma administrasi publik (dalam Umar, 2017: 24-28) mencakup:

1. Dikotomi Politik- Administrasi (1900-1926)

Pada periode 1900-1926 administrasi publik tampaknya hanya berfokus pada lokus. Fokusnya hanya pada birokrasi pemerintah untuk menangani dua peran utama pemerintah yang berbeda, yakni politik serta administrasi.

2. Prinsip Administrasi Publik (1927-1937)

Pada periode 1927-1937 menjadi jelas bahwa politik serta administrasi tidak dapat dipisahkan. Dalam paradigma ini, lokasi penerapan prinsip tidak terlalu penting dibandingkan dengan fokusnya, yaitu prinsip administrasi atau POSDCORB (*Planning, Organization,*

Staffing, Directing, Reporting, and Budgeting), yang pada saat itu dianggap dapat diterapkan secara umum.

3. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Birokrasi pemerintah ditekankan sebagai lokasi yang tepat untuk administrasi publik, dan fokus administrasi publik dipandang tidak memadai.

4. Administrasi sebagai Ilmu Administrasi (1956-1979)

Karena prinsip-prinsip administrasi bersifat *universal* serta ilmu administrasi publik lebih fokus daripada lokus, maka ilmu ini kurang mampu melampaui lokus.

5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-kini)

Pada masa ini, teori organisasi, ilmu kebijakan, dan ekonomi politik telah dipengaruhi oleh evolusi ilmu administrasi publik.

Paradigma yang sangat revolusioner yang dikenal dengan “*reinventing government*” pertama kali muncul pada tahun 1992. Paradigma ini mengakui bahwa pemerintah adalah sebuah masalah dalam dirinya sendiri, bukan sebagai pemecah masalah.

Berikut ini adalah bagaimana paradigma administrasi publik berkembang (Umar, 2017: 31-33):

1. *The Old Public Administration (OPA)*

Karena bidang administratif dan bisnis dipandang sebagai sesuatu yang identik, maka bidang administratif perlu memiliki struktur organisasi yang

mencerminkan model bisnis, yaitu kekuasaan eksekutif dan kontrol. Struktur organisasi yang hirarkis sangat penting untuk pelaksanaan tugas yang efektif.

2. New Public Management (NPM)

Persoalan dalam memberikan pelayanan publik tidak dapat diselesaikan dengan paradigma yang berkembang sebagai hasil dari pertimbangan paradigma sebelumnya, yakni OPA. Paradigma ini menggeser fokus pelayanan publik dari masyarakat ke konsumen dengan menggunakan konsep manajemen komersial dalam organisasi pemerintah. Hal ini dilakukan dengan menemukan metode baru dalam memberikan pelayanan dan dengan melakukan pendekatan dari sudut pandang ekonomi.

3. New Public Service (NPS)

Paradigma ini menggeser fokus dari pasar, kompetisi, dan konsumen di sektor swasta ke demokrasi, kebanggaan, dan warga negara di samping manajemen. Melayani warga negara daripada konsumen, mendahulukan kepentingan publik, bertindak secara strategis dan demokratis, menyadari bahwa tanggung jawab tidak mudah, lebih memilih untuk memberikan pelayanan daripada memimpin, dan menghargai orang daripada hanya output adalah prinsip-prinsip NPS. Hal ini merupakan hasil dari fokus paradigma tersebut pada pelayanan masyarakat, yang memperhitungkan keefektifan dalam mengimplementasikannya. Untuk mencapai tujuan secara efisien dan menciptakan Pelayanan Publik Baru yang baik, diperlukan manajemen publik yang tepat.

1.6.3 Manajemen Publik

Sumber daya alam yang dimiliki sangatlah terbatas tetapi kebutuhan manusia tidaklah terbatas. Aliran manajemen yang diperkenalkan oleh Peter Drucker dalam Sarinah dan Mardalena ini dianggap berkonsentrasi pada hasil yang dicapai daripada interaksi karyawan. Manajemen berdasarkan hasil mengacu pada strategi guna mencapai hasil yang paling banyak melalui rencana yang transparan serta terukur di awal implementasi. (Sarinah dan Mardalena, 2017: 16)

Dalam Sarinah dan Mardalena, Stephen P. Robbins dan Mary Coulter mendeskripsikan manajemen sebagai sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh para manajer yang meliputi mengawasi dan mengkoordinasikan pekerjaan orang lain untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan sukses serta efektif (Sarinah dan Mardalena, 2017: 1)

Manajemen publik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan manajemen yang mengkoordinasikan kepentingan beberapa orang. Organisasi pemerintahan sangat terikat dengan manajemen publik. Menurut Overman dalam Pasolong, manajemen publik ialah bidang studi interdisipliner yang menggabungkan fungsi-fungsi manajemen umum-seperti pengorganisasian, perencanaan, dan pengawasan-dengan keuangan, informasi, politik, sumber daya fisik, dan sumber daya manusia di sisi lain (Pasolong, 2017:96).

Berdasarkan pendapat para ahli sebelumnya, manajemen publik Dapat dijelaskan sebagai pengalokasian sumber daya yang efisien dan produktif

melalui serangkaian prosedur manajemen untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan arahan kebijakan publik.

Proses manajemen (Sarinah dan Mardalena, 2017: 7-8) mencakup:

1. Perencanaan, yakni Untuk mencapai tujuan dan sasaran, proses ini memerlukan upaya untuk memprediksi tren masa depan dengan memilih rencana dan metode terbaik.
2. Pengorganisasian, yakni Bagaimana rencana dan taktik yang dikembangkan dapat berfungsi di dalam kerangka kerja, sistem, serta lingkungan yang kuat dan sesuai, serta menjamin bahwa semua anggota perusahaan mampu beroperasi secara produktif dan berhasil.
3. Pengarahan, yakni proses di mana semua anggota organisasi mengadopsi program dan terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk menginspirasi mereka agar bekerja dengan cermat dan efektif.
4. Pengendalian, yaitu prosedur untuk memastikan bahwa, terlepas dari perubahan lingkungan, semua kegiatan dilakukan sebagaimana mestinya.

Efektivitas program diposisikan pada pengawasan atau pengendalian, yang menjamin bahwa Proses lengkap yang telah dirancang, dikelola, serta dijalankan dapat berfungsi secara efisien dan memenuhi sasaran yang diinginkan.

1.6.4 Efektivitas

Efektivitas menurut Campbell dan Anisah dan Soesilowati adalah sejauh mana suatu organisasi mampu melaksanakan tugas utamanya atau memenuhi tujuannya (Anisah & Soesilowati, 2018).

Komunikasi yang efektif didefinisikan oleh Effendy dalam Amelia sebagai tindakan yang diambil untuk memenuhi tujuannya sesuai dengan dana yang dialokasikan, batasan waktu, dan tingkat staf (Amelia, 2015: 9).

Efektivitas, menurut Tampieri dalam jurnal Daniel Esemie Gbervbie dan Jide Ibietan, adalah tingkat keberhasilan tujuan dan kaitan dengan efek yang diinginkan dan efek aktual produk dalam mencapai tujuan (Jide & Gbervbie, 2013: 51).

Emerson dalam Handyaningrat mendefinisikan Tingkat pencapaian sasaran yang telah direncanakan (Handyaningrat, 2011: 16).

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pengukur sejauh mana target yang ditetapkan telah dipenuhi menurut pendapat ahli tersebut. Efektivitas mengukur sejauh mana target yang ditetapkan telah dipenuhi; semakin dekat hasil dari tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuannya, maka semakin efektif kegiatan tersebut.

1.6.5 Efektivitas Program

Menurut Arikunto dalam Ristiawan program ialah sebagai kegiatan yang meliputi sekelompok individu yang melaksanakan suatu kebijakan dalam suatu organisasi secara berkesinambungan. (Ristiawan, 2019: 35)

Program adalah salah satu jenis kebijakan publik, yang termasuk dalam berbagai bentuk kebijakan seperti UU, PP, Perpres serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat publik di berbagai tingkat.

Hal ini menjadikan program sebagai salah satu aktivitas yang dapat dinilai, dan hasil dari evaluasi tersebut dimanfaatkan untuk mengoptimalkan efektivitas

program. Efektivitas program adalah suatu cara yang digunakan guna menilai seberapa baik kinerja suatu program dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Steers dalam (Tangklisan, 2005:141) memaparkan 5 (lima) kriteria dalam menilai efektivitas program, yakni:

- a. Kinerja
- b. Fleksibilitas kerja
- c. Kepuasan kerja.
- d. Potensi keuntungan
- e. Identifikasi sumber daya

Dalam bukunya tentang efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2011:7), Makmur berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal, yaitu:

1. Ketepatan penentuan waktu: dapat berpengaruh kepada seberapa efektif suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya: ini dilakukan agar program tidak kekurangan dana atau anggaran sampai program tersebut selesai.
3. Ketepatan dalam pengukuran: ini berarti bahwa standarisasi harus diterapkan saat menjalankan program. Keefektivitasan program diukur dengan ketepatan standar yang digunakan.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: ini adalah tindakan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena menentukan pilihan menggabungkan proses yang sangat penting untuk mencapai keefektifitasan.
5. Ketepatan berpikir: dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: ini adalah tindakan yang dapat memberikan instruksi dengan cara yang jelas dan mudah difahami.
7. Ketepatan dalam menetapkan tujuan: tujuan yang tepat akan membantu melakukan tugas dengan efektif.
8. Ketepatan sasaran: dapat menentukan apakah tindakan yang diambil berhasil mencapai tujuan.

Dalam menganalisis sejauh mana efektivitas program *e-parking* dalam mewujudkan *smart city* di Kota Semarang ini berjalan, peneliti menerapkan teori ukuran efektivitas Makmur (2011:7) Peneliti meyakini bahwa teori ini berguna untuk menjawab rumusan masalah. Teori ini akan memudahkan pemahaman peneliti yang mencakup ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menetapkan tujuan, ketepatan sasaran serta permasalahan efektivitas program e-parkir terkait pengelolaan parkir yang belum berjalan dengan baik

1.6.6 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program

Berbagai faktor yang berpengaruh pada efektivitas program menurut Ripley (Erwan dan Dyah, 2012: 105-110) meliputi :

1. Akses, kemudahan dalam menjangkau program yang diberikan oleh pemerintah. Kelompok sasaran program ini yakni masyarakat harus memiliki kemudahan akses untuk bisa menghubungi pihak terkait untuk menggali informasi ataupun mengajukan keluhan.
2. Cakupan, menentukan kelompok sasaran serta membandingkan jumlah kelompok sasaran yang telah menerima layanan dengan keseluruhan kelompok sasaran merupakan cakupan. Kelompok sasaran yang telah dijangkau oleh program “*e-parkir*” menjadi cakupan dalam studi ini..
3. Frekuensi, yaitu seberapa banyak sasaran program dapat menerima fasilitas yang dijanjikan. Tinggi rendahnya frekuensi layanan yang diberikan akan berpengaruh pada baik dan buruknya penerapan program tersebut.
4. Bias, yaitu penyimpangan dimana pelaksanaan program tidak terjadi penyimpangan dalam keberjalanannya.
5. Ketepatan layanan, yaitu dimana program tepat waktu atau *output* sebuah program sensitif terhadap ketepatan waktu, sehingga keterlambatan dalam pelaksanaan program dapat menyebabkan gagalnya pencapaian tujuan. program.
6. Akuntabilitas, yaitu apakah pelaksana program dalam menjalankan program ke kelompok sasaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan yang mana tidak mengurangi hak-hak dari kelompok sasaran.

7. Kesesuaian program dengan kebutuhan, adanya program yang berjalan dan dihaasilkan itu apakah sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran atau tidak.

1.6.7 E-Parking

E-Parking yaitu parkir elektronik dimana perangkat yang gunanya menerima pembayaran parkir secara elektronik juga menggiring sebuah kota menuju kota pintar dengan langkah pemanfaatan teknologi. *E-parking* muncul sebagai solusi modern yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengotomatiskan proses pemantauan dan manajemen ruang parkir serta mengurangi waktu parkir (Zulhilmi, 2023: 2). Melalui penerapan sistem ini, pengguna dapat membayar parkir secara elektronik dengan mudah.

E-parking (parkir elektronik) juga termasuk ke dalam bagian dari *smart parking system* (sistem parkir pintar), dimana menurut *San Fransisco Municipal Transportation Agency* (dalam Naufal, 2017: 7) bahwa *smart parking system* bertujuan guna mempermudah pengelolaan parkir.

Berikut elemen dasar serta manfaat *smart parking system* :

1. *Easier payment methods*, atau menyederhanakan prosedur pembayaran karena *e-money* digunakan dalam transaksi
2. *Improved muni speed and reliability*, atau mempercepat prosedur parkir dan pembayaran, terutama di daerah yang padat.
3. *Reduced illegal parking*, atau dapat meminimalisir parkir liar
4. *Improved safety for all road users*, atau membantu mengurangi risiko kecelakaan yang banyak terjadi di jalan raya

5. *Increasing economic vitality and competitiveness*, atau dapat mempermudah akses masuk ke kawasan bisnis yang padat.

1.6.8 Smart City

Smart city ialah sebuah konsep pertumbuhan teknologi yang diimplementasikan di seluruh sistemnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Pratama (dalam Nurmawan, 2019: 1276) yang menyatakan bahwa *Smart city* adalah konsep pembangunan yang melibatkan penggunaan teknologi di suatu lokasi untuk memfasilitasi interaksi sistem yang rumit. Caragliu (dalam Kireina, 2017: 69) menyajikan sudut pandang alternatif, yang menyatakan bahwa *Smart city* ialah kota yang bisa memanfaatkan modal sosial dan sumber daya manusia guna mencapai kualitas hidup yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat dalam administrasi pemerintahan.

Enam model *smart city* agar kota berhasil dalam menjalankan konsep *smart city* menurut Suhono (dalam Kireina, 2017: 68) meliputi:

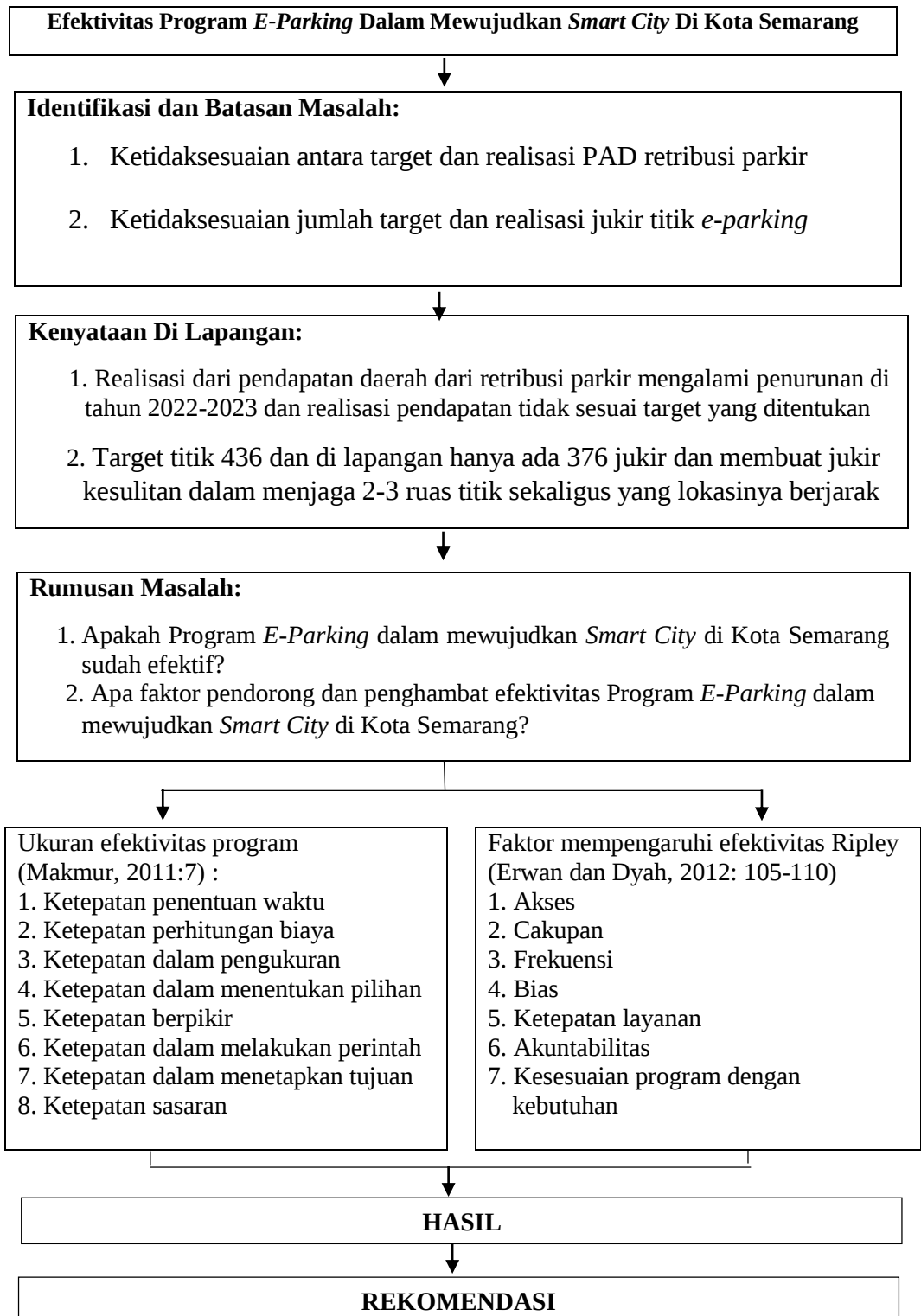
1. *Smart government*, artinya sebagai entitas utama dalam negara, pemerintah mempunyai peran serta tugas guna menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dengan transparansi dan kepedulian terhadap seluruh penduduknya.
2. *Smart people*, Fokus utama dari konsep ini ialah lahirnya masyarakat berkapasitas dan berkesadaran diri.
3. *Smart economy*, peningkatan peluang usaha serta persaingan pasar

4. *Smart mobility*, Proses pengelolaan infrastruktur kota di masa depan adalah sistem terpadu yang dirancang untuk memastikan prioritas pada kepentingan masyarakat.
5. *Smart living*, Lingkungan yang memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, serta estetika fisik dan non-fisik untuk masyarakat.
6. *Smart live*, Manusia memiliki tingkat kualitas hidup yang terukur serta beradab.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1.1

Bagan Kerangka Pemikiran



1.8 Operasionalisasi Konsep

Efektivitas program ialah suatu pengukuran sejauh mana tujuan keberjalanan program telah tercapai. Fenomena studi bagi Efektivitas Program *E-Parking* dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Semarang menggunakan ukuran efektivitas program yakni :

1. **Ketepatan penentuan waktu**, dapat berpengaruh kepada seberapa efektif program *e-parking* mencapai tujuan. Adapun fenomena dari ketepatan penentuan waktu di program *e-parking* terdiri dari sub fenomena, antara lain :
 - a. Ketepatan waktu pelaksanaan program *e-parking*
2. **Ketepatan perhitungan biaya**, ini dilakukan agar program tidak kekurangan dana atau anggaran sampai program tersebut selesai sesuai Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Adapun fenomena dari ketepatan perhitungan biaya di program *e-parking* terdiri dari sub fenomena, antara lain :
 - a. Ketepatan anggaran program *e-parking*
3. **Ketepatan dalam pengukuran**, ini berarti bahwa standarisasi harus diterapkan saat menjalankan program *e-parking*. Keefektivitasan program diukur dengan ketepatan standar yang digunakan sesuai dengan Perwal 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Adapun fenomena dari ketepatan dalam pengukuran di program *e-parking* terdiri dari sub fenomena, antara lain :
 - a. Ketepatan dalam pengukuran alokasi pendapatan retribusi

4. **Ketepatan dalam menentukan pilihan**, ini adalah tindakan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena menentukan pilihan menggabungkan proses yang sangat penting untuk mencapai keefektifitasan sesuai dengan Perwal 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.. Adapun fenomena dari ketepatan dalam menentukan pilihan di program *e-parking* terdiri dari sub fenomena, antara lain :
 - a. Ketepatan dalam menentukan pilihan sistem elektronik
5. **Ketepatan berpikir**, dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan Perwal 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Adapun fenomena dari ketepatan berpikir di program *e-parking* terdiri dari sub fenomena, antara lain :
 - a. Ketepatan dalam pelayanan parkir meliputi pelaksana dan lokasi
6. **Ketepatan dalam melakukan perintah**, ini adalah tindakan yang dapat memberikan instruksi dengan cara yang jelas dan mudah difahami sesuai dengan surat tugas yang diberikan Dishub ke petugas parkir. Adapun fenomena dari ketepatan dalam melakukan perintah di program *e-parking* terdiri dari sub fenomena, antara lain :
 - a. Ketepatan dalam surat tugas jukir *e-parking*
7. **Ketepatan dalam menetapkan tujuan**, tujuan yang tepat akan membantu melakukan tugas dengan efektif sesuai dengan tujuan *e-parking* yaitu meningkatkan PAD dan kemajuan kota. Adapun fenomena

dari ketepatan dalam menentukan tujuan di program *e-parking* terdiri dari sub fenomena, antara lain :

- a. Ketepatan dalam meningkatkan PAD
- b. Ketepatan dalam meningkatkan kemajuan kota

8. **Ketepatan sasaran**, dapat menentukan apakah tindakan yang diambil berhasil mencapai tujuan sesuai kriteria sasaran peserta program. Adapun fenomena dari ketepatan sasaran di program *e-parking* terdiri dari sub fenomena, antara lain :

- a. Ketepatan sasaran kriteria peserta program

Guna mengetahui faktor pendorong serta penghambat keefektifan program *e-parking*, dapat dilihat beberapa faktor yang berpengaruh pada efektivitas program yakni :

1. Akses, yaitu masyarakat sebagai sasaran program harus memiliki kemudahan akses untuk bisa menghubungi pihak terkait untuk menggali informasi ataupun mengajukan keluhan.
2. Cakupan, yaitu kelompok sasaran yang telah dijangkau dalam keberjalanan program *e-parking* yang mana cakupan disini ialah masyarakat Kota Semarang.
3. Frekuensi, yaitu seberapa banyak kelompok sasaran dapat memperoleh kemudahan dalam keberjalanan program *e-parking*.
4. Bias, yaitu penyimpangan dimana keberjalanan program tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dari penyelenggara dalam keberjalanannya.

5. Ketepatan layanan, yaitu dimana sebuah program memiliki sensitivitas terhadap waktu dalam hal ini program *e-parking* apakah sudah tepat waktu dalam keberjalanannya yang seharusnya mempersingkat waktu dalam penarikan retribusi parkir.
6. Akuntabilitas, yaitu apakah keberjalanan *e-parking* dapat dipertanggungjawabkan oleh Dishub terkait tidak adanya hak dari pengguna parkir dan juru parkir yang dikurangi.
7. Kesesuaian program dengan kebutuhan, adanya program *e-parking* yang berjalan itu sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat yaitu memudahkan masyarakat guna membayar retribusi parkir secara daring.

1.9 Argumen Penelitian

Kota Semarang sebagai salah satu kota yang menerapkan *e-parking* di Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah kepemilikan kendaraan bermotor terbanyak di Provinsi Jawa Tengah serta satu-satunya kota yang menerapkan *e-parking* dengan pembayaran menggunakan QRIS. Tetapi dengan masih banyaknya parkir liar dan belum baiknya pengelolaan parkir dimana beberapa titik *e-parking* masih terdapat juru parkir yang kesulitan untuk menghandel 2 hingga 3 titik, menyebabkan potensi adanya parkir liar.

Program *e-parking* yang terus dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Semarang belum dikelola dengan baik dan hal itu mengharuskan adanya *e-parking* untuk tetap memperhatikan indikator serta faktor pendorong dan penghambat dalam tercapainya efektivitas program *e-parking* dalam mewujudkan *smart city* di Kota Semarang.

1.10 Metodologi Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Dalam studi ini, memakai jenis penelitian kualitatif. Untuk pendekatan yang penulis ambil yaitu pendekatan deskriptif. Dimaksudkan bahwa riset ini mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai suatu kenyataan yang diteliti selanjutnya digunakan untuk menganalisis masalah. Pendekatan ini dipilih guna mendapatkan data dari jawaban verbal maupun non verbal dari suatu yang diamati dan apapun yang berkaitan dengan yang diteliti, sehingga peneliti dapat mengkaji lebih dalam terhadap objek yang diteliti secara factual dan jelas.

1.10.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang peneliti pilih yakni Kota Semarang. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan oleh seperti: Pertama di Kota Semarang merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Jawa Tengah yang menerapkan *e-parking*, selain itu *e-parking* yang sudah bisa menggunakan QRIS, *shopeepay*, *ovo* hanya ada di Kota Semarang. Sedangkan untuk kabupaten atau kota lainnya *e-parking* masih menggunakan mesin parkir dan harus menggunakan kartu tap berupa kartu emoney yang ditempelkan ke mesin parkir.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah orang yang paham benar serta mengetahui sebuah persoalan tertentu dan darinya penulis dapat memperoleh informasi yang akurat, jelas, serta terpercaya. Sumber informasi penelitian dalam penelitian ini bisa berupa keterangan serta pernyataan, juga data-data yang turut membantu mengenai

pemahaman informasi tentang “Efektivitas Program *E-Parking* Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Semarang”.

Sumber informasi penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan keterangan mengenai studi ini. Dengan metode *snowball sampling* penulis hendak memilih informan untuk studi ini. *Snowball sampling* merupakan suatu teknik sampling yang dimulai dari sedikit data dan meningkat secara bertahap menurut Sugiyono (dalam Indriani, 2012: 54). *Snowball sampling* ini merupakan teknik dengan penentuan satu *Key* atau satu narasumber kunci yang mana nantinya apabila data didapat kurang memuaskan maka *key* tersebut dapat memberikan akses kepada narasumber lain sebagai rujukan yang dipilih untuk melengkapi data. Harapan digunakan teknik ini yaitu kriteria sampel yang didapat relevan dengan penelitian dan dapat menggambarkan kondisi yang sedang diteliti. Dari ini peneliti memilih Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai kunci penentu rujukan bagi narasumber berikutnya guna melengkapi data peneliti.

1.10.4 Instrumen Penelitian

Hardani dkk (2020:119) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai alat pengumpulan data. Sebagai instrumen penelitian, seorang peneliti diwajibkan untuk divalidasi dimana bertujuan untuk mengetahui kesiapan penelitian sebelum terjun lapangan. Validasi yang dilakukan sebelum melakukan penelitian, antara lain : penguasaan wawasan pada bidang yang akan diteliti, pemahaman terkait metode penelitian kualitatif, serta tingkat peneliti dalam menempuh objek penelitian baik secara logistik ataupun akademik. Peneliti kualitatif yang berperan sebagai *human instrument* juga memiliki beberapa tugas,

antara lain : memutuskan sebuah fokus penelitian, melakukan pemilihan Informan yang berfungsi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan informasi, menilai kualitas data, menganalisis hasil, menginterpretasikan data, dan menyusun kesimpulan dari hasil penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan beberapa instrumen, antara lain subjek manusia, yaitu peneliti dan partisipan lain yang berperan sebagai alat dan pengumpul data. Instrumen penelitian selain manusia, yang dibutuhkan sebagai alat bantu dalam penelitian ini antara lain : pedoman wawancara dimana dapat dimanfaatkan namun memiliki fungsi terbatas guna mendukung instrumen kunci yaitu peneliti. Dengan demikian, hadirnya peneliti bersifat wajib karena peneliti secara langsung berhubungan langsung dengan lingkungan yang ada dalam kancah penelitian.

1.10.5 Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian kualitatif, maka sumber data berupa kata-kata serta tindakan, dan data pelengkap lainnya seperti dokumen dan sebagainya. Jenis data deskriptif kualitatif yang berwujud kata-kata tertulis untuk mendukung penguatan pengkajian permasalahan yang akan diteliti. Data-data tersebut bersumber dari hasil wawancara melalui beberapa narasumber yang sudah ditentukan. Sumber data lainnya diperoleh dari buku maupun artikel ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam studi ini. Sitoyo dan Sodik (2015: 68) mengkategorikan jenis data berdasarkan bentuk dan sifatnya dibagi ke dalam dua jenis data diantaranya :

1. Data Primer

Data primer ialah data yang perolehannya secara langsung dari objek, data primer seringkali disebut dengan data mentah ataupun data pertama.

Dalam mendapatkan data primer, peneliti diwajibkan untuk melakukan pengumpulan secara langsung dimana memanfaatkan teknik seperti wawancara. Adapun data primer dalam studi ini yakni hasil wawancara dengan narasumber terkait program *e-parking* di Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang perolehannya secara tidak langsung dari suatu objek penelitian, yang mana berupa sumber data dari Biro Pusat Statistika (BPS), artikel jurnal, buku, serta laporan. Data sekunder yang penulis dapati berupa data-data terkait rekapitulasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor berupa mobil dan sepeda motor di kota Semarang dan rekapitulasi data jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di 10 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah, berita, artikel jurnal serta skripsi terkait dengan efektivitas program *e-parking* dalam mewujudkan Smart City di Kota Semarang.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu yang sangat penting dalam penelitian. Dimana teknik pengumpulan data itu pada dasarnya sasaran utama pada sebuah penelitian yakni untuk memperoleh data. Jadi apabila tidak terdapat teknik pengumpulan data, maka berdampak pada tidak terpenuhinya kualifikasi pada ketetapan standar data. Pendekatan wawancara terpimpin yang memiliki arah dalam mengumpulkan data yang relevan merupakan strategi yang digunakan dalam pengumpulan data studi ini. Hardani dkk (2020:140) mendeskripsikan kelebihan dari wawancara terpimpin antara lain : pertanyaan sistematis sehingga mudah untuk diolah kembali, kesimpulan yang diperoleh lebih reliabel, serta

pemecahan permasalahan lebih mudah. Selain itu, proses pengolahan data tidak wajib dilaksanakan sembari menunggu terkumpulnya data ataupun berakhirnya proses pengolahan data. Dengan kata lain, data yang sudah didapatkan dan data tersedia dapat dianalisis dan diproses bersama.

1.10.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis pilih pada riset ini yakni analisis data kualitatif, ini dilakukan mulai dari saat pengumpulan data sedang berlangsung hingga setelah selesai atau data dianggap telah sesuai dengan kebutuhan riset. Adapun langkah langkah analisis data kualitatif menurut Miles Dan Huberman dalam Martono (2015:42). Beberapa cara analisis data yakni:

1.10.7.1 Reduksi Data

Reduksi data yaitu diartikan dengan merangkum, memilah pilah aspek utama, dan focus kepada hal penting terkait tema serta polanya dan selanjutnya akan diperoleh data yang memiliki gambaran lebih jelas sehingga memudahkan dalam pencarian berikutnya.

1.10.7.2 Penyajian Data

Setelah direduksi, kemudian data di display dengan cara, menyajikannya dalam bentuk baik bagan, atau uraian singkat, atau keterkaitan antar kategori dan sejenisnya Penyajian data ini bersifat naratif karena penelitian yang dipilih yaitu kualitatif, dengan adanya penyajian data akan memudahkan dalam memahami lebih mendalam.

1.10.7.3 Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya yaitu menarik kesimpulan, jika suatu kesimpulan di awal dikemukakan dengan sifat yang sementara maka bisa berubah, tetapi jika hasil akhir disajikan dengan dukungan bukti yang sah dan konsistensi dalam pengumpulan data di lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh akan menjadi kesimpulan yang dapat dipercaya.

1.10.8 Kualitas Data

Triangulasi adalah strategi untuk mengecek keaslian data dengan cara membandingkan temuan hasil wawancara dengan hasil penelitian dengan metode yang berbeda (Khaharuddin, 2020:330). Ada beberapa cara untuk melakukan triangulasi, antara lain dengan observasi, dokumen, dan wawancara (Nasution, 2003:115).

Denzin (dalam Moleong, 2004) membuat perbedaan antara empat kategori triangulasi: penyidik, sumber, prosedur, dan terapi. Dari keempat metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan pendekatan pemeriksaan melalui pemanfaatan sumber.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi data dari berbagai sumber membantu menentukan keandalan informasi. Informasi yang dikumpulkan dari beragam sumber dikarakterisasi, diklasifikasikan untuk menentukan sudut pandang yang sama, berbeda, dan serta spesifik dari sumber-sumber data tersebut. Hasilnya, analisis peneliti terhadap data memungkinkan penarikan kesimpulan yang konsisten dengan sumber data.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah proses verifikasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan banyak pendekatan untuk menilai keandalan data. Dalam penelitian ini, triangulasi metodologi mengharuskan peneliti memeriksa informasi yang didapat melalui wawancara dan melakukan referensi silang dengan observasi serta dokumentasi. Jika metode penilaian kredibilitas data menghasilkan hasil yang tidak konsisten, peneliti harus melakukan diskusi menyeluruh tentang hal itu dengan sumber data yang relevan atau dengan peneliti lain.

Tujuan dari kualitas data adalah untuk memverifikasi keakuratan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara. Pemeriksaan keabsahan data perlu menggunakan prosedur pemeriksaan. Penulis penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memperoleh kualitas data. Dengan menggunakan pendekatan triangulasi sumber, penulis memeriksa dan membandingkan data yang dikumpulkan dari beberapa sumber saat melakukan penelitian. Ada beberapa metode untuk menguji kualitas data seperti:

- a. hasil pengamatan dan wawancara dibandingkan,
- b. Pernyataan yang dibuat di hadapan umum dan yang dikemukakan secara pribadi dibandingkan,
- c. Data dari narasumber dibandingkan dengan data dari dokumen terkait,
- d. Beragam opini dari masyarakat umum, individu berpendidikan tinggi, dan pejabat pemerintah dibandingkan dalam konteks perspektif dan situasi masing-masing.

Dalam penelitian kualitatif peneliti memakai metode wawancara, observasi guna memverifikasi sebenarnya. Di samping itu, peneliti juga memanfaatkan berbagai informan yang berbeda untuk memastikan kebenaran dan keaslian data. Triangulasi pada tahap ini dilakukan apabila data didapat informan peneliti diragukan kebenaran dan keasliannya. Pengujian kualitas data dilakukan oleh peneliti untuk memastikan data yang valid dan konsisten dalam menilai keberhasilan program *e-parking* dalam menciptakan *smart city* di kota Semarang.